PENERAPAN KURIKULUM PEMBELAJARAN IPS DI THAILAND

Rama Putra Adyatama

Email : 1810111210020@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Berdasarkan asumsi filosofis, studi banding subyektif tidak memandang realitas sebagai objek tunggal. Masalah epistemologis dan aksiologi menjadi pertimbangan penting dalam pendidikan komparatif. Mengetahui perbedaan dan perbandingan sistem pendidikan antara negara-negara ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa isu yang harus dipertimbangkan untuk sistem pendidikan. Sadar atau tidak sadar perbandingan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup dan pengembangan pribadi, melalui citra diri dengan merefleksikan aspek kehidupan yang sama dari orang lain. Studi perbandingan pendidikan sebagai bagian dari bidang pendidikan memiliki manfaat faktual, terutama sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Dengan mempertimbangkan dan mempelajari keuntungan dari sistem pendidikan yang ada di negara-negara lain, seseorang dapat belajar banyak hal dari negara dan menggunakannya untuk kemajuan pendidikan di negara ini.

Kata Kunci : Pembelajaran IPS, Kurikulum, Sistem Pendidikan, Indonesia, Thailand

Pendahuluan

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Sriyanto, 2014b; Puskur, 2001 : 9). Materi pelajaran IPS merupakan penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Porda, H (2013: 39) menjelaskan pembelajaran IPS sejalan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi pada era informasi dan perkembangan iptek. Pergerakan aktivitas kehidupan manusia semakin cepat dan tiada batas. Pembelajaran khususnya

pembelajaran IPS harus dapat mempersiapkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada era kekinian. Sementara menurut Anis M. Z. A (2013: 149) Ketika revolusi rasional melanda dunia pemikiran, maka banyak pemikir cenderung menggunakan metode dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Metode dan teknik ilmu alam saat itu juga mewarnai ilmu sosial.

Menurut Syaharudin (2013) proses pembelajaran di sekolah tingkat tertentu tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal, tanpa adanya sebuah kurikulum. Hal ini mengingat tidak adanya kepastian yang dapat dijadikan landasan oleh semua pelaku pendidikan dalam melangsungkan proses dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana, isi, pengaturan, bahan pelajaran, cara dan pedoman untuk melangsungkan proses pembelajaran (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Untuk itu, kurikulum dan pengembangan kurikulum merupakan sebuah keharusan untuk dapat melangsungkan proses pembelajaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan terukur. Di sisi lain, kurikulum akan menunjukkan arah dan filosofi pendidikan yang akan dikembangkan oleh suatu negara.

Dalam artikel ini akan membahas kurikulum social studies atau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah di Thailand. Ada beberapa alasan yang melandasi pemilihan untuk artikel ini, yaitu: (1) masyarakat Thailand adalah masyarakat multikultural, baik dari segi etnis, bangsa, agama dan bahasa; (2) Thailand adalah negara yang dianggap berhasil dalam pendidikan dan pendidikan multikultural khususnya yang berkaitan dengan persoalan kehidupan negara berbentuk monarki konstitual.

Pembahasan

SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ILMU SOSIAL DI THAILAND

Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Thailand dibagi ke dalam 76 daerah pemerintahan (propinsi) yang dikenal dengan sebutan changwats dan 1 (satu) Daerah Khusus Bangkok. Propinsi selanjutnya dibagi ke dalam sejumlah distrik (setara dengan kabupaten) dan sub-distrik (setara dengan kecamatan). Populasi penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas seperti Cina, Akha, Lisu, Karen, Hmong, suku-suku pegunungan di daerah utara Thailand dan Melayu di Thailand selatan.

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup:

1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.
2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat
3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (*Office for National Education Standards and Quality Assessment*, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. (Yunardi: 2014)

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Kurikulum Thailand memuat 8 mata pelajaran inti yaitu: Bahasa Thai, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Agama dan Budaya, Kesehatan dan Olah raga, Seni, Karir dan Teknologi, dan Bahasa Asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah dasar cukup tinggi mencapai 98.3 persen untuk populasi anak berumur 6-11 tahun (2010). Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar dari 90 persen, namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60 persen (Unesco, 2011).

Untuk setiap bidang pembelajaran, standar baku berperan sebagai target yang ingin dicapai dalam mengembangkan kualitas peserta didik. Standar ini menentukan apa yang peserta didik harus tahu dan harus mampu lakukan. Standar ini juga menunjukkan nilai-nilai moral dan etika serta karakter yang diinginkan setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, standar pembelajaran berperan sebagai mekanisme penting dalam memajukan sistem pendidikan secara keseluruhan, karena standar ini memberikan informasi kepada kita

tentang isi pelajaran dan metoda pengajaran dan evaluasi. Standar juga berfungsi sebagai instrumen untuk penjaminan mutu dan diadopsi baik sebagai evaluasi penjaminan mutu internal dan maupun eksternal, yang telah dipraktekkan pada layanan pendidikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai kualitas seperti yang ditentukan dalam standar yang bersangkutan.

Klasifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta didik Thailand meliputi:

- a). Agama, Moralitas dan Etika: konsep fundamental tentang agama, moralitas, etika dan prinsip dari agama budha atau agama dari peserta didik; penerapan dari ilmu agama, prinsip dan pengajaran terhadap pengembangan diri serta kedamaian, keharmonisan hidup berdampingan; kemampuan melakukan perbuatan baik; memperoleh nilai yang diinginkan; mengembangkan diri secara berkelanjutan seperti halnya penyediaan layanan untuk kepentingan sosial dan hal lain yang perlu diperhatikan
- b). Kewarganegaraan, budaya dan bermasyarakat: politis dan sistem administrasi yang berlangsung pada masyarakat; bentuk demokratis pemerintahan di bawah Monarki Konstitusional; karakteristik dan pentingnya warga negara yang baik; perbedaan budaya dan keberagaman; nilai di bawah monarki konstitusional; hak, kewajiban dan kebebasan yang damai ada di masyarakat Thailand serta masyarakat dunia.
- c). Ekonomi: produksi, distribusi dan konsumsi dari barang dan jasa; manajemen dari adanya sumber daya yang terbatas; gaya hidup

Guru IPS di Thailand memahami dengan baik kondisi ekonomi dan nasional dalam rencana pengembangan ekonomi dan sosial untuk mengintegrasikannya dalam manajemen pembelajaran ilmu sosial ke arah yang sama dengan suatu kesimpulan. Ekonomi perkembangan selama 5 abad sebelumnya telah berhasil dengan memuaskan. Struktur produksi berubah dari pertanian ke industri dan jasa dengan potensi yang cukup untuk mengembangkan untuk pembentukan basis produksi untuk meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi nasional untuk mencapai tuas negara kaya di masa depan yang akan datang. Dalam Ekonomi Dan Sosial Nasional Rencana Pembangunan, ada 6 strategi nasional yang ditentukan dalam lingkup pembangunan nasional untuk mewujudkan visi “Stabilitas, Kemakmuran dan berkelanjutan” dan menjunjung tinggi

prinsip “Sufficiency Economy” sebagai berikut: 1) Strategi untuk stabilitas, 2) Strategi peningkatan daya saing, 3) Strategi pembangunan dan peningkatan potensi, 4) Strategi penyediaan kesempatan dan kesetaraan sosial, 5) Strategi untuk membangun kualitas hidup ramah lingkungan yang lebih baik, 6) Strategi untuk menyeimbangkan dan mengembangkan administrasi dan manajemen negara (Thanin Pha- aim, 2015). Oleh karena itu, manajemen pendidikan Ilmu Sosial di abad 21 ini diperlukan untuk mendukung pengembangan Thailand di bawah Model Thailand 4.0 (Suwit Maysinthree, 2015), untuk memperoleh pendapatan tinggi dan meningkatkan daya saing ekonomi dengan inovasi 4 dimensi pembangunan yang seimbang: kemakmuran yang seimbang, ekonomi, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kecerdasan manusia, serta diperlukan untuk memodifikasi pendidikan untuk memenuhi "Pendidikan Thailand 4.0" di mana buku teks dan evaluasi dapat dimodifikasi dan disesuaikan agar sejalan dengan kurikulum yang berfokus pada berpikir dan belajar keterampilan yang penting untuk perkembangan peserta didik. Untuk mengajar Ilmu Sosial di abad 21, diperlukan modifikasi manajemen pembelajaran agar siswa bisa secara eksperimental berlatih sampai keterampilan belajar untuk pemenuhan kurikulum adalah diperoleh, serta siap menjadi warga negara yang baik untuk memajukan Thailand ; Siswa dan guru ilmu sosial dituntut untuk bekerja sama dalam manajemen pembelajaran yang akan memberikan pengalaman yang berlaku untuk kehidupan nyata seperti yang disebutkan lebih lanjut.

Untuk manajemen pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered*), peserta didik akan bergantung pada berbagai proses pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan kurikulum. Di antara proses belajar yang penting untuk peserta didik adalah: proses pembelajaran terpadu; proses penciptaan pengetahuan; proses berpikir; proses sosial; belajar heuristik proses; proses belajar dari pengalaman nyata; proses praktik yang sebenarnya; proses manajemen; proses penelitian; proses belajar mandiri; dan proses pengembangan karakteristik. Peserta didik harus dilatih dan menerima pengembangan lebih lanjut untuk memperoleh kompetensi dalam proses ini, yang akan memfasilitasi pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan kurikulum. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempelajari dan memahami berbagai proses pembelajaran agar dapat membuat pilihan yang bijaksana.

PERBANDINGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN IPS DI THAILAND DENGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN IPS DI INDONESIA

Dalam pendidikan di Indonesia melalui kurikulum 2013, Standar isi dalam kurikulum 2013 disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi.

Sekolah di Thailand memiliki standar kompetensi lulusan yang harus di capai oleh peserta didik dan berdasarkan studi dokumentasi terhadap kurikulum inti 2008 (*The Basic Education Core Curriculum Buddhist Education 2551 (Anno Domini 2008)*) yang telah dipublikasi oleh Menteri Pendidikan Thailand menetapkan standar kompetensi lulus yang mengacu pada sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut; 1. Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan seseorang dan prinsip-prinsip Ekonomi Kecukupan; 2. Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi know-how, dan kecakapan hidup; 3. Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan preferensi untuk latihan fisik; 4. Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional, dan; 5. Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan eksistensi yang harmonis.

Selain itu dalam standar kompetensi lulusan, Kurikulum Inti Pendidikan Dasar berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan seperti berikut ini, sehingga memungkinkan peserta didik menikmati hidup yang selaras antara satu sama lain sebagai warga negara Thailand dan warga dunia; 1. Cinta kepada bangsa, agama dan Raja; 2. Kejujuran dan integritas; 3. Kedisiplinan diri; 4. Antusiasme untuk belajar; 5. Kepatuhan terhadap prinsip filsafat kemandirian ekonomi; 6. Dedikasi dan komitmen untuk bekerja; 7. Menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand.

Sedangkan kurikulum 2013 di Indonesia didapati berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dijelaskan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Dalam lingkupnya Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kedudukan pengajaran IPS begitu unik karena harus mempersiapkan dan mendidik anak didik untuk hidup dan memahami dunianya, dimana kualitas personal dan kualitas sosial seseorang akan menjadi hal yang sangat vital. Menurut A.K. Ellis (1991), bahwa alasan dibalik diajarkannya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah karena hal-hal sebagai berikut:

- a) IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan demokrasi.
- b) IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan "dunianya".
- c) IPS adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif.
- d) IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar (fundamental understanding) tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.
- e) IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial.

Kesimpulan

Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia dan Thailand yang diuraikan di atas terdapat istilah yang berbeda-beda. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia diajarkan berdasarkan ketentuan pada pendidikan dasar (SD dan SMP). Di sekolah Dasar IPS diajarkan melalui pendekatan ke dalam bentuk yang terpisah-pisah (separated), korelasi (corelated), dan fusi (integrated). Nama IPS dalam dunia pendidikan dasar di Indonesia muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum SD, SMP dan SMU tahun 1975. Dilihat dari sisi keberlakuannya, IPS disebut sebagai bidang studi “baru”, karena cara pandangnya bersifat terpadu. Hal tersebut mengandung arti bahwa IPS bagi pendidikan dasar dan menengah merupakan hasil perpaduan dari mata pelajaran geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut memiliki objek material kajian yang sama yaitu manusia.

Dalam pembelajaran IPS guru harus mempunyai peranan kunci dalam mengembangkan strategi pembelajaran IPS bermuatan kompetensi sosial dan guru harus menguasai materi, variasi metode, media, sumber belajar, dan assessment, serta komitmen yang tinggi akan pentingnya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kompetensi sosial siswa, bagaimana siswa dapat membentuk konsep diri dan respon positif dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif antara siswa dalam keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Kepala sekolah, sarana dan prasarana, kesiapan masyarakat sebagai sumber pembelajaran, dan tenaga pendidikan lain, dapat menjadi pendukung guru dalam menghasilkan pembelajaran IPS berbasis kompetensi sosial.

Berkaitan dengan ASEAN, Indonesia dan Thailand merupakan dua negara dalam kawasan asia tenggara. Dalam perkembangan pendidikan di negara asean hendaknya memiliki komitmen untuk menciptakan pendidikan yang lebih maju dengan mengacu pada perkembangan teknologi dan iptek. Walaupun hal tersebut telah dicanangkan sebagai tujuan jangka panjang. Namun dalam implementasi kurikulum ASEAN belum menunjukkan hasil yang maksimal dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Efektivitas kurikulum akan sangat berpengaruh ketika para murid telah menghadapi persaingan global secara karakter maupun kompetensi. Kurikulum Thailand diharapkan menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi berbahasa asing dengan baik, baik dari lisan maupun tertulis. Dan pendidikan Indonesia diharakan mampu

menciptakan siswa yang memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Sumber Pustaka

Abbas, E. W. (2013). *Mewacanakan Pendidikan IPS*, Bandung: Wahana Jaya Abadi.

Anis, M. Z. A. (2013). ILMU SEJARAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS. *Mewacanakan Pendidikan IPS*, 149.

Depdikbud. (1993). *Kurikulum Pendidikan Dasar: Landasan, Program, dan Pengembangan*, Jakarta: Depdikbud.

Ministry of Education Thailand. (2008). *The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)*. Bangkok: The Ministry of Education Thailand

Skeel, D .J., (1995). *Elementary Social Studies, Challenges for Tomorrow's World*, Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.

Pusatbangkurrandik , (1984). *Kurikulum 1984 SD (Sekolah Dasar): Landasan, Program, dan Pengembangan*, Jakarta: Pusatbangkurrandik, Depdikbud, 1984.

Siribodhi, T (2011), *Basic Education Curriculum in Thailand: Content and Reform*, SEAMEO Secretariat, Bangkok, Thailand.

Sriyanto, (2014 b). Perilaku Asertif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa, *Jurnal Psikologi*, Volume 41 No 1 Juni 2014, Hlm. 74 -88.

Unesco. (2011), "Education Profiles", Unesco Bangkok,
<http://www.unescobkk.org/education/resources/resources/education-system/profiles/thailand/basic-education/>